

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi.

Tujuan umum Laporan Keuangan SKPD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi entitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi;
- 6) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan ini terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran ;
- b) Neraca ;
- c) Laporan Operasional ;
- d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan;
- b) Belanja;
- c) Transfer ;

- d) Surplus/Defisit ;
- e) Pembiayaan ;
- f) Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran

Neraca

Neraca Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Kami mengklasifikasikan aset dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Kami mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima kembali atau dibayar kembali dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a) Kas dan setara kas ;
- b) Investasi jangka pendek ;
- c) Piutang pajak dan bukan pajak ;
- d) Persediaan ;
- e) Investasi jangka panjang ;
- f) Aset tetap ;
- g) Kewajiban jangka pendek ;
- h) Kewajiban jangka panjang ;
- i) Ekuitas.

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional;
- b) Beban dari Kegiatan Operasional;
- c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional;
- d) Surplus/defisit-LO

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Kinerja APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Bupati Brebes Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 133 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan disusun adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD	
	3.1	LRA
		3.1.1 Pendapatan_LRA
		3.1.2 Belanja
	3.2	LO
		3.2.1 Pendapatan –LO
		3.2.2 Beban
		3.2.3 Kegiatan Non Operasional
		3.2.4 Pos Luar Biasa
	3.3	Laporan Perubahan Ekuitas
		3.3.1 Perubahan Ekuitas
	3.4	Neraca
		3.4.1 Aset
		3.4.2 Kewajiban
		3.4.3 Ekuitas
	3.5	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang rnenggunakan basis akrual pada Pemda.
	3.6	Laporan Arus Kas BLUD
	3.7	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD
Bab IV	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD	
Bab V	Penutup	

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target Kinerja APBD. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

Untuk memberikan gambaran secara jelas ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel bawah ini :

1. Tabel pencapaian target dan realisasi pendapatan

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	101.499.704.700,00	105.717.357.719,00	4.217.653.019,00	104,16%
2	PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-	#DIV/0!
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	#DIV/0!
	JUMLAH PENDAPATAN	101.499.704.700,00	105.717.357.719,00	4.217.653.019,00	104,16%

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1	Pajak Daerah	-	-	-	#DIV/0!
2	Retribusi Daerah	1.094.000.000,00	1.234.420.111,00	140.420.111,00	112,84%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	#DIV/0!
4	Lain-lain PAD yang Sah	100.405.704.700,00	104.482.937.608,00	4.077.232.908,00	104,06%
	Jumlah PAD	101.499.704.700,00	105.717.357.719,00	4.217.653.019,00	104,16%

b. Pendapatan Transfer

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA BERIMBANGAN				
1	Dana Bagi Hasil Pajak				
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
3	Dana Alokasi Umum				
4	Dana Alokasi Khusus				

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
	Jumlah				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
1	Dana Otonomi Khusus				
2	Dana Penyesuaian				
	Jumlah				
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
	Jumlah				
	Jumlah Pendapatan Transfer				

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
1	Pendapatan Hibah				
2	Pendapatan Dana Darurat				
3	Pendapatan Lain-lain				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah				

Kinerja mengenai anggaran pendapatan dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Realisasi pendapatan sebesar Rp 105.717.357.719,00 dari target yang ditetapkan Rp101.499.704.700,00 atau 104,16 %.
- 2) Realisasi pendapatan 4.217.653.019,00 lebih dari anggaran.

2. Tabel pencapaian target dan realisasi belanja

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Belanja Pegawai	116.731.856.119,00	112.957.047.329,00	(3.774.808.790,00)	96,77%
2	Belanja Barang dan Jasa	205.241.319.836,00	200.631.875.473,00	(4.609.444.363,00)	97,75%
3	Belanja Modal	47.924.918.878,00	42.155.061.591,00	(5.769.857.287,00)	87,96%
	Jumlah	369.898.094.833,00	355.743.984.393,00	(14.154.110.440,00)	96,17%

Kinerja mengenai anggaran belanja dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp dari anggaran yang ditetapkan Rp atau %.
- b. Realisasi Belanja Barang Jasa sebesar Rp dari anggaran yang ditetapkan Rp atau %.
- c. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp dari anggaran yang ditetapkan Rp atau %.

Secara keseluruhan realisasi belanja mencapai % dari yang dianggarkan.

3. Tabel pencapaian target dan realisasi pembiayaan (khusus SKPKD)

a. Penerimaan Pembiayaan

NO	URAIAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				
2	Pencairan Dana Cadangan				
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan				
	Jumlah				

Kinerja mengenai anggaran penerimaan pembiayaan dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Realisasi SILPA sebesar Rp dari anggaran yang ditetapkan Rp atau %.
- 2) Realisasi Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp dari anggaran yang ditetapkan Rp atau %.
- 3) Realisasi Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp dari anggaran yang ditetapkan Rp atau %.
- 4) Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp dari anggaran yang ditetapkan Rp atau %.
- 5) Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp dari anggaran yang ditetapkan Rp atau %.

- 6) Realisasi Penerimaan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan sebesar Rp dari anggaran yang ditetapkan Rp atau %.

Secara keseluruhan realisasi penerimaan pembiayaan mencapai % dari yang dianggarkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

NO	URAIAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Pembentukan Dana Cadangan				
2	Penyertaan Modal Daerah				
3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo				
4	Pemberian Pinjaman Daerah				
5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan				
	Jumlah				

Kinerja mengenai anggaran pengeluaran pembiayaan dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Realisasi Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp dari anggaran yang ditetapkan Rp atau %.
- 2) Realisasi Penyertaan Modal sebesar Rp dari anggaran yang ditetapkan Rp atau %.
- 3) Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp dari anggaran yang ditetapkan Rp atau %.
- 4) Realisasi Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp dari anggaran yang ditetapkan Rp atau %.
- 5) Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp dari anggaran yang ditetapkan Rp atau %.

Secara keseluruhan realisasi pengeluaran pembiayaan mencapai % dari yang dianggarkan.

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

.....

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh daerah. Ikhtisar Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan				
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah				
Jumlah				

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2022, maka realisasi pendapatan yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes Tahun 2023 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp atau %.

Realisasi masing-masing Pendapatan Daerah dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar Rp..... Realisasi sebesar Rp atau % . Realisasi secara rinci dengan komposisi sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Pajak Daerah				
b. Retribusi daerah				
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah				
d. Lain-Lain PAD yang sah				
Jumlah				

a. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi pendapatan dari pajak daerah kurang/melebihi target sebesar ... atau realisasi mencapai Rp .

Realisasi secara rinci dapat dirinci sebagai berikut :

Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Pajak Hotel				
Pajak Restoran				
Pajak Hiburan				
Pajak Reklame				
Pajak Penerangan Jalan				
Pajak Parkir				
Pajak Air Tanah				
Pajak Sarang Burung Walet				
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				
Pajak Bumi dan Bangunan				
Pajak Lingkungan				
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				
Jumlah	-	-		-

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dapat terealisasi Rp atau % dari target sebesar Rp sebagaimana rincian berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Jasa Usaha				
Retribusi Perizinan Tertentu				
Jumlah				

Realisasi secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Pelayanan Kesehatan				
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat				

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				
Retribusi Pelayanan Pasar				
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran				
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta				
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus				
Retribusi Pengolahan Limbah Cair				
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang				
Retribusi Pelayanan Pendidikan				
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				
Retribusi Pelayanan Kependudukan				
Jumlah				

2) Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Retribusi Jasa Usaha				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan				
Retribusi Tempat Pelelangan				
Retribusi Terminal				
Retribusi Tempat Khusus Parkir				
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila				
Retribusi Rumah Potong Hewan				
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga				
Retribusi Penyeberangan di Air				
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah				
Jumlah				

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Retribusi Perizinan Tertentu				
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan				

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman				
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				
Retribusi Izin Usaha Perikanan				
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas				
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)				
Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan				
Jumlah				

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp ... dari yang direncanakan sebesar Rp ... dengan rincian sebagai berikut :

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN				
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD				
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta				
Jumlah				

Rincian bagian laba sebagai berikut :

Nama BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta	Realisasi 2023
PT. Bank Jateng	
PD Bank Brebes	
BKK Banjarharjo	
BKK Jateng	
PD Air Minum Tirta Husada (PDAM)	
PD Percetakan	
PD Farmasi	
PRPP	
Jumlah	

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah sebesar Rp dari yang direncanakan sebesar Rp atau % dengan rincian sebagai berikut :

Lain-Lain PAD yang Sah :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Hasil Penjualan BMD Yang Tdk Dipisahkan				
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan				
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan				
Hasil Kerja Sama Daerah				
Jasa Giro Kas Daerah				
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir				
Pendapatan Bunga				
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah				
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain				
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing				
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				
Pendapatan Denda Pajak Daerah				
Pendapatan Denda Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan				
Pendapatan dari Pengembalian				
Pendapatan BLUD				
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan				
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir				
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)				
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah				
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf				
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA				
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA				
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA				
Jumlah				

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Brebes setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar Rp..... Realisasi sebesar Rp atau %. Realisasi secara rinci dengan

sebagai berikut:

Pendapatan Transfer :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
Pendapatan Transfer Antar Daerah				
JUMLAH				

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Dana Perimbangan				
Dana Insentif Daerah (DID)				
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur				
Dana Keistimewaan				
Dana Desa				
JUMLAH				

Penjelasan :

- 1) Dana Perimbangan tahun 2023 berupa :
 - DTU-Dana Bagi Hasil sebesar Rp
 - DTU-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp
 - DTU-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp
 - DTU-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp
- 2) Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp
- 3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp
- 4) Dana Keistimewaan sebesar Rp
- 5) Dana Desa sebesar Rp
 - Rincian penerimaan Dana Desa per Desa sesuai lampiran

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keuangan				
JUMLAH		-		-

Penjelasan :

- 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi berupa :
 - a) Bagi Hasil Pajak sebesar Rp
 - b) Bagi Hasil Pajak sebesar Rp

- c) Bagi Hasil Pajak sebesar Rp
- 2) Pendapatan Bantuan Keuangan berupa :
- a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp
- b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Brebes setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar Rp..... Realisasi sebesar Rp atau %.
Realisasi secara rinci dengan sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Pendapatan Hibah				
Dana Darurat				
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
JUMLAH				

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya				
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri				
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri				
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis				
JUMLAH	-	-		-

Penjelasan :

- 1) Pendapatan hibah dari pemerintah pusat berupa sebesar Rp
- 2) Pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya berupa sebesar Rp
- 3) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri berupa sebesar Rp
- 4) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri berupa sebesar Rp
- 5) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis berupa sebesar Rp

b. Dana Darurat

Dana Darurat berupa dianggarkan sebesar Rp..... terealisasi sebesar Rp..... atau%

Dana Darurat :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Dana Darurat				

c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Pendapatan Hibah Dana BOS				
Pendapatan atas Pengembalian Hibah				
JUMLAH	-	-		-

Penjelasan :

- 1) Pendapatan Dana BOS berupa :
 - a) BOS Reguler sebesar Rp
 - b) BOS Afiriasi sebesar Rp
 - c) BOS Kinerja sebesar Rp
- 2) Pendapatan atas Pengembalian Hibah berupa sebesar Rp ...

3.1.2 Belanja

Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2023 yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran sebesar Rp dari anggaran Rp dengan perincian sebagai berikut :

Belanja :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Operasi				
b. Belanja Modal				
c. Belanja Tak Terduga				
d. Belanja Transfer				
Jumlah				

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Dalam Tahun Anggaran 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes merealisasikan belanja operasi sebesar Rp dari anggaran sebesar Rp Komposisi realisasi belanja operasi sebagai berikut :

Belanja Operasi :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah				

a. Rincian/penjelasan Belanja Pegawai sebagai berikut :

Belanja Pegawai :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Gaji dan Tunjangan				
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN				
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD				
e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH				
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH				
g. Belanja Pegawai BOS				
h. Belanja Pegawai BLUD				
Jumlah				

- 1) Belanja Pegawai BOS sebesar Rp terdiri dari :
 - a) Belanja Pegawai BOS pada Satdikdas sebesar Rp
 - b) Belanja Pegawai BOS pada Satdikmen sebesar Rp
- 2) Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp terdiri dari :
(*untuk BLUD RSUD penjelasan disesuaikan*)
 - a) Puskesmas sebesar Rp
 - b) Puskesmas sebesar Rp
 - c) Puskesmas sebesar Rp
 - d) Puskesmas sebesar Rp
 - e) Puskesmas sebesar Rp
 - f) Puskesmas sebesar Rp

b. Rincian/penjelasan Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Barang				

	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
b.	Belanja Jasa				
c.	Belanja Pemeliharaan				
d.	Belana Perjalanan Dinas				
e.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
f.	Belanja Barang dan Jasa BOS				
g.	Belanja Barang dan Jasa BLUD				
	J u m l a h				

- 1) Belanja Barang merupakan belanja barang persediaan sesuai rincian sebagai berikut :

	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a.	Belanja Barang Pakai Habis				
b.	Belanja Barang Tak Habis Pakai				
c.	Belanja Barang Bekas Dipakai				
	J u m l a h				

Penjelasan :

Rincian Belanja Barang Pakai Habis disajikan pada **lampiran 3.1.1**

- 2) Belanja Jasa sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

	Belanja Jasa :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a.	Belanja Jasa Kantor				
b.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi				
c.	Belanja Sewa Tanah				
d.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				
e.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				
f.	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi				
g.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya				
h.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi				
i.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi				
j.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)				
k.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				

Belanja Jasa :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				
m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah				
n. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah				
J u m l a h				

3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pemeliharaan :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Pemeliharaan Tanah				
b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				
d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				
J u m l a h				

4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri				
J u m l a h				

5) Belanja Uang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Uang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masy :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				

Belanja Uang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masy :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
J u m l a h				

6) Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp terdiri dari :

Belanja Barang dan Jasa BOS :	Realisasi 2023
a. Belanja Barang dan Jasa Satdikdas	
b. Belanja Barang dan Jasa Satdikmen	
J u m l a h	-

7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp terdiri dari :
(*untuk BLUD RSUD penjelasan disesuaikan*)

Belanja Barang dan Jasa BLUD :	Realisasi 2023
a. Puskesmas	
b. Puskesmas	
c. Puskesmas	
d. Puskesmas	
e. Puskesmas	
f. Puskesmas	
J u m l a h	-

c. Realisasi Belanja Bunga sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Bunga :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat				
b. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain				
c. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)				
d. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)				
e. Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)				
f. Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD				
J u m l a h				

Penjelasan :

- 1) Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank merupakan bunga atas pinjaman dibayarkan kepada Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp
- 2) Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank merupakan bunga atas pinjaman dibayarkan kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp ...
- 3) Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD merupakan bunga atas pinjaman BLUD untuk yang dibayarkan kepada Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp ...

d. Realisasi belanja Subsidi adalah NIHIL

e. Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Hibah :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat				
b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
c. Belanja Hibah kepada BUMN				
d. Belanja Hibah kepada BUMD				
e. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
f. Belanja Hibah Dana BOS				
g. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
J u m l a h				

Penjelasan :

- 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan dalam bentuk :

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat			#DIV/0!	
b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat			#DIV/0!	
c. Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat			#DIV/0!	
J u m l a h	-	-	#DIV/0!	-

Rincian Barang Hibah kepada Pemerintah Pusat disampaikan pada **lampiran 3.1.2**

- 2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya diberikan dalam bentuk :

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya			#DIV/0!	
b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya			#DIV/0!	
c. Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya			#DIV/0!	
J u m l a h	-	-	#DIV/0!	-

Rincian Barang Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya disampaikan pada **lampiran 3.1.2**

3) Belanja Hibah kepada BUMN diberikan dalam bentuk :

Belanja Hibah kepada BUMN :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Hibah Uang kepada BUMN			#DIV/0!	
b. Belanja Hibah Barang kepada BUMN			#DIV/0!	
c. Belanja Hibah Jasa kepada BUMN			#DIV/0!	
J u m l a h	-	-	#DIV/0!	-

Rincian Barang Hibah kepada BUMN disampaikan pada **lampiran 3.1.2**

4) Belanja Hibah kepada BUMD diberikan dalam bentuk :

Belanja Hibah kepada BUMD :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Hibah Uang kepada BUMD			#DIV/0!	
b. Belanja Hibah Barang kepada BUMD			#DIV/0!	
c. Belanja Hibah Jasa kepada BUMD			#DIV/0!	
J u m l a h	-	-	#DIV/0!	-

Rincian Barang Hibah kepada BUMD disampaikan pada **lampiran 3.1.2**

5) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia diberikan dalam bentuk :

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022

a.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			#DIV/0!	
b.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar			#DIV/0!	
c.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan			#DIV/0!	
d.	Belanja Hibah kepada Koperasi			#DIV/0!	
J u m l a h		-	-	#DIV/0!	-

Rincian Barang Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia disampaikan pada **lampiran 3.1.2**

- 6) Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp diberikan kepada satdikdas negeri serta satdikdas, satdikmen dan satdiksus swasta sesuai **lampiran 3.1.3**
- 7) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp terealisasi sebesar Rp atau %. Rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Nama Partai	Realisasi 2023 (Rp)
a. Partai ...	
b. Partai ...	
c. Partai ...	
d. Partai ...	
J u m l a h	

- f. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Bantuan Sosial :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu				
b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga				
c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat				
d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				
J u m l a h				

Penjelasan :

- 1) Belanja Bantuan Sosial kepada individu diberikan dalam bentuk :
- a. Uang, merupakan uang sebesar Rp

- b. Barang, merupakan bantuan sosial sebesar Rp
Rincian Barang Bantuan Sosial kepada Individu disampaikan pada **lampiran 3.1.4**
- 2) Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga diberikan dalam bentuk :
- a. Uang, merupakan uang sebesar Rp
- b. Barang, merupakan bantuan sosial sebesar Rp
Rincian Barang Bantuan Sosial kepada keluarga disampaikan pada **lampiran 3.1.4**
- 3) Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat diberikan dalam bentuk :
- a. Uang, merupakan uang sebesar Rp
- b. Barang, merupakan bantuan sosial sebesar Rp
Rincian Barang Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat disampaikan pada **lampiran 3.1.4**
- 4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) diberikan dalam bentuk :
- a. Uang, merupakan uang sebesar Rp
- b. Barang, merupakan bantuan sosial sebesar Rp
Rincian Barang Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) disampaikan pada **lampiran 3.1.4**

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi berupa pengeluaran untuk perolehan aset tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya serta belanja modal aset tidak berwujud. Realisasi belanja modal dalam Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp..... dari anggaran sebesar Rp..... dengan rincian:

Belanja Modal :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Modal Tanah				
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
g. Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah				

- a. Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Tanah sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal Tanah :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Modal Tanah				
b. Belanja Modal Tanah BLUD				
Jumlah				

Penjelasan :

1) Belanja Modal Tanah meliputi :

- a) Tanah sebesar Rp
- b) Tanah sebesar Rp
- c) Tanah sebesar Rp

2) Belanja Modal Tanah BLUD meliputi :

- a) Tanah sebesar Rp
- b) Tanah sebesar Rp
- c) Tanah sebesar Rp

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Peralatan dan Mesin :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Modal Alat Besar				
b. Belanja Modal Alat Angkutan				
c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur				
d. Belanja Modal Alat Pertanian				
e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				
f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar				
g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan				
h. Belanja Modal Alat Laboratorium				
i. Belanja Modal Komputer				
j. Belanja Modal Alat Eksplorasi				
k. Belanja Modal Alat Pengeboran				
l. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian				
m. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi				
n. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja				
o. Belanja Modal Alat Peraga				
p. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi				

Belanja Aset Tetap Lainnya :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan				
b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga				
c. Belanja Modal Hewan				
d. Belanja Modal Biota Perairan				
e. Belanja Modal Tanaman				
f. Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya				
g. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi				
h. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud				
i. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS				
j. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD				
Jumlah				

3. Belanja Tak Terduga (khusus untuk SKPKD)

Belanja Tak Terduga adalah belanja yang dialokasikan untuk penanganan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah. Realisasi belanja tak terduga dalam Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp dari anggaran sebesar Rp .

Belanja Tidak Terduga :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Belanja Tak Terduga				
Jumlah				

Penggunaan Belanja Tak Terduga meliputi :

- a. Penggunaan untuk penanganan COVID-19 dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian BTT COVID-19	Realisasi 2023
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

No	Uraian BTT COVID-19	Realisasi 2023
10		
	Jumlah	-

- b. Penggunaan untuk penanganan darurat bencana dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian BTT Darurat Bencana :	Realisasi 2023
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Jumlah	-

- c. Penggunaan untuk pengembalian pendapatan tahun sebelumnya dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian BTT Pengembalian Pendapatan :	Realisasi 2023
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Jumlah	-

4. Belanja Transfer (khusus untuk SKPKD)

Belanja Transfer merupakan transfer bagi hasil ke desa yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi dan bantuan keuangan. Realisasi Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp dari anggaran sebesar Rp .

Belanja Transfer :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Bagi Hasil				
b. Belanja Bantuan Keuangan				
Jumlah				

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa, dijelaskan sesuai tabel berikut :

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten				
b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota				
c. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada				
Jumlah	-	-		-

- b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, dijelaskan sesuai tabel berikut :

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa				
Jumlah				

3.1.3 Pembiayaan (khusus untuk SKPKD)

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp dijelaskan sesuai tabel berikut :

Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				
b. Pencairan Dana Cadangan				

Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
d. Penerimaan Pinjaman Daerah				
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
Jumlah				

Penjelasan Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut :

- a. SiLPA tahun sebelumnya terealisasi sebesar Rp
- b. Pencairan Dana Cadangan terealisasi sebesar Rp merupakan dana cadangan untuk pembangunan
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp merupakan penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp merupakan pinjaman kepada untuk keperluan dengan jangka waktu
- e. Penerimaan kembali pinjaman daerah sebesar Rp merupakan penerimaan atas pokok piutang dana bergulir pada SKPD dengan rincian sesuai tabel berikut :

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah :	Realisasi 2023
a. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan	
b. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	
c. Dinas Peternakan	
d. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
Jumlah	

- f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp merupakan

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp dijelaskan sesuai tabel berikut :

Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Pembentukan Dana Cadangan				
b. Penyertaan Modal Daerah				
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo				
d. Pemberian Pinjaman Daerah				

Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
Jumlah				

Penjelasan Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut :

- a. Pembentukan Dana Cadangan terealisasi sebesar Rp merupakan dana cadangan untuk pembangunan
- b. Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp merupakan penyertaan modal kepada BUMD dengan rincian sebagai berikut :

Penyertaan Modal Daerah :	Realisasi 2023
a. PT Bank Jateng Cabang Brebes	
b. BKK Jateng	
c. BKK Brebes	
d. BKK Banjarharjo	
e. Perumda BPR Bank Brebes	
f. Perumda Air Minum Tirta Baribis (PDAM)	
g. Perusda Percetakan Puspa Grafika	
h. dst ...	
Jumlah	

- c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp merupakan pembayaran atas pokok pinjaman kepada untuk keperluan dengan jangka waktu
- d. Pemberian pinjaman daerah sebesar Rp merupakan pemberian atas investasi
- e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp merupakan

3. Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Terealisasi sebesar Rp dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp atau %. Rinciannya dijelaskan pada tabel berikut :

Pembiayaan :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Penerimaan Pembiayaan				
b. Pengeluaran Pembiayaan				
Pembiayaan Netto				

3.2 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun. Laporan operasional menyajikan pos-pos Pendapatan-LO, Beban, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa.

3.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Brebes yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2023 dan 2022.

Pendapatan-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Pendapatan-LO				
1. Pendapatan Asli Daerah – LO				
2. Pendapatan Transfer – LO				
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO				
Jumlah				

1. Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2023 adalah sebesar Rp dengan rincian sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Pendapatan Asli Daerah-LO				
a. Pendapatan Pajak Daerah – LO				
b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO				
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO				
d. Lain-lain PAD Yang Sah – LO				
Jumlah				

a. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah – Lo adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Pendapatan Pajak Daerah – LO				
a. Pajak Hotel-LO				
b. Pajak Restoran-LO				

c. Pajak Hiburan-LO				
d. Pajak Reklame-LO				
e. Pajak Penerangan Jalan-LO				
f. Pajak Parkir-LO				
g. Pajak Air Tanah-LO				
h. Pajak Sarang Burung Walet-LO				
i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO				
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO				
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO				
l. Pajak Lingkungan - LO				
Jumlah	-	-	-	

b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Pajak Retribusi Daerah - LO adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Pendapatan Retribusi Daerah – LO				
a. Retribusi Jasa Umum-LO				
b. Retribusi Jasa Usaha-LO				
c. Retribusi Perizinan Tertentu-LO				
Jumlah				

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO				
a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO				
b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO				
c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO				
Jumlah				

d. Lain-lain PAD yang Sah - LO

Lain-lain PAD yang Sah – LO adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Lain-lain PAD yang Sah-LO				
a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO				
b. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO				
c. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO				
d. Hasil Kerja Sama Daerah-LO				
e. Jasa Giro-LO				
f. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO				
g. Pendapatan Bunga-LO				
h. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO				
i. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO				
j. Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO				
k. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO				
l. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO				
m. Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO				
n. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO				
o. Pendapatan dari Pengembalian-LO				
p. Pendapatan dari BLUD-LO				
q. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO				
r. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO				
s. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO				
t. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO				
u. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO				
v. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf -LO				
w. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO				
x. Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO				
y. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO				
Jumlah				

2. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer – LO tahun 2023 adalah sebesar Rp dengan rincian sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Pendapatan Transfer – LO				
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO				
b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO				
c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO				
d. Bantuan Keuangan - LO				
Jumlah				

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO tahun 2023 adalah sebesar Rp sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO				
a. Pendapatan Hibah – LO				
b. Dana Darurat – LO				
c. Pendapatan Lainnya – LO				
Jumlah				

a. Rincian Pendapatan Hibah – LO :

Pendapatan hibah – LO dirinci sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Pendapatan Hibah – LO				
a. Pendapatan Hibah BEC				
b. Penerimaan Pabrik Gula				
c. Pendapatan Hibah Barang				
d. Dst.....				
Jumlah				

b. Rincian Dana Darurat

Dana Darurat tahun 2023 sebesar NIHIL

c. Rincian Pendapatan Lainnya - LO

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Pendapatan Lainnya – LO				
a. Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan				
b. Dispensasi Kelebihan Muatan				
c. Bantuan dari Pihak ke-3				
d. Tera Ulang				
e. Ijin Usaha Perkebunan				
f. Ijin Usaha Perikanan				
g. Bantuan Retribusi SP3 Kayu				
h. Pendapatan Dana BOS				
i. Dst....				
Jumlah				

3.2.2 Beban

Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Beban				
a. Beban Operasi				
b. Beban Transfer				
Jumlah				

1. Rincian Beban Operasi sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
BEBAN OPERASI				
a. Beban Pegawai				
b. Beban Persediaan				
c. Beban Jasa				
d. Beban Pemeliharaan				
e. Beban Perjalanan Dinas				
f. Beban Bunga				
g. Beban Subsidi				
h. Beban Hibah				
i. Beban Bantuan Sosial				
j. Beban Penyusutan dan Amortisasi				
k. Beban Penyisihan Piutang				
l. Beban Lain-lain				
Jumlah				

- a. Beban operasi tersebut termasuk di dalamnya beban yang berasal dari Belanja BLUD. Atas belanja BLUD tersebut telah dilakukan mapping ke masing-masing rincian beban sebagai berikut :

Mapping Beban BLUD :	Realisasi 2023 (Rp)
BEBAN OPERASI	
a. Beban Pegawai	
b. Beban Persediaan	
c. Beban Jasa	
d. Beban Pemeliharaan	
e. Beban Perjalanan Dinas	
f. Beban Bunga	
g. Beban Subsidi	
h. Beban Hibah	
i. Beban Bantuan Sosial	
j. Beban Penyusutan dan Amortisasi	
k. Beban Penyisihan Piutang	
l. Beban Lain-lain	
Jumlah	

- b. Atas belanja BOS tersebut juga telah dilakukan mapping ke masing-masing rincian beban sebagai berikut :

Mapping Beban BOS	Realisasi 2023 (Rp)
BEBAN OPERASI	
a. Beban Pegawai	
b. Beban Persediaan	
c. Beban Jasa	
d. Beban Pemeliharaan	
e. Beban Perjalanan Dinas	
f. Beban Bunga	
g. Beban Subsidi	
h. Beban Hibah	
i. Beban Bantuan Sosial	
j. Beban Penyusutan dan Amortisasi	
k. Beban Penyisihan Piutang	
l. Beban Lain-lain	
Jumlah	-

- c. Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah TA 2023 sebesar Rp , merupakan Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta termasuk di dalamnya Beban Barang-barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat. Beban hibah yang dicatat adalah sesuai nilai barang yang diserahkan sebesar Rp . Rekap Mutasi Barang yang dihibahkan kepada pihak ke-3 sebagai berikut :

Saldo 2022		Pengadaan 2023		Dihibahkan 2023		Reklasifikasi AT		Sisa 2023	
Jml Brg	Jumlah (Rp)	Jml Brg	Jumlah (Rp)	Jml Brg	Jumlah (Rp)	Jml Brg	Jumlah (Rp)	Jml Brg	Jumlah (Rp)

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan aset tetap tahun 2023 adalah sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|---------|
| a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | Rp |
| b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | Rp |
| c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp |
| d. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | Rp |

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2023 berupa amortisasi software sebesar Rp..... Rincian Beban Amortisasi dan Akumulasi Amortisasi tahun 2023 sebagai berikut :

Nama Software	Umur s.d 2023	Nilai Software (Rp)	Amortisasi per tahun (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2022 (Rp)	Beban Amortisasi 2023 (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2023 (Rp)
Jumlah						

e. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp , terdiri dari :

Beban Penyisihan Piutang :	Nilai (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan	
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	
Jumlah	-

2. Rincian Beban Transfer disampaikan sebagaimana tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
a. Beban Bagi Hasil				
b. Beban Bantuan Keuangan				
Jumlah				

a. Beban Bagi Hasil

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Beban Bagi Hasil				
a. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa				
b. Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa				
Jumlah				

b. Beban Bantuan Keuangan

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Beban Bantuan Keuangan				
a. Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi				
b. Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota				
c. Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota				
d. Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi				
e. Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa				
f. Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota				
g. Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik				
Jumlah				

3. Beban Tak Terduga tahun 2023 sebesar Rp , adapun rincian penggunaan beban tak terduga adalah :
- Penggunaan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp
 - Penggunaan untuk darurat bencana sebesar Rp
 - Penggunaan untuk pengembalian pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp
- Penggunaan secara rinci telah disampaikan pada penjelasan Belanja Tak Terduga.

3.2.3 Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
SURPLUS NON OPERASIONAL – LO				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO				
JUMLAH				
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/ Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO				
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO				
JUMLAH				
SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL – LO				

1. Surplus Non Operasional

Secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	
1	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	
2	Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	
3	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang- LO	
4	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO	
	Jumlah	
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	
1	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	
2	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	
3	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	
4	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO	
5	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
	Jumlah	
	Total	

Penjelasan :

a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO

Pada tahun 2023 dilaksanakan penjualan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp____. Barang-barang tersebut telah dijual dengan nilai buku Rp (nilai perolehan – nilai penyusutan). Penerimaan kas pada SKPD atas penjualan tersebut sebesar Rp 0,00 (hasil penjualan langsung disetor ke Kas Daerah). Selisih atas nilai jual terhadap nilai buku dicatat sebagai Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO sebesar Rp .

- b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO sebesar Rp
- c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp

2. Defisit Non Operasional

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	
1	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	
2	Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	
3	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	
	Jumlah	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	
1	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	
2	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	
3	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	
4	Defisit Penyelesaian Obligasi-LO	
5	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO	
6	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	
	Jumlah	-
	Total	-

Penjelasan :

a. Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO

Pada tahun 2023 dilaksanakan penjualan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp____. Barang-barang tersebut telah dijual dengan nilai buku Rp (nilai perolehan – nilai penyusutan). Penerimaan kas pada OPD atas penjualan tersebut sebesar Rp 0,00 karena hasil penjualan langsung disetor ke Kas Daerah. Selisih atas nilai jual terhadap nilai buku dicatat sebagai Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO sebesar Rp .

- b. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO sebesar Rp
- c. Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp

3.2.4. Pos Luar Biasa

Pendapatan dari Pos Luar Biasa sebesar NIHIL dan Beban dari Pos Luar Biasa sebesar NIHIL.

3.3 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2023 dibandingkan dengan TA 2022.

Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar **Rp** berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp , ditambah Surplus-LO TA 2023 sebesar minus **Rp** ditambah Dampak Kumulatif Perubahan/Kebijakan/Kesalahan Mendasar **Rp** , dan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan sebesar **Rp**.

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan/Kebijakan/Kesahan Mendasar sebagai berikut :

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Koreksi Ekuitas Lainnya		
Jumlah		

Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp merupakan selisih dari penambahan dan pengurangan koreksi ekuitas lainnya (Rp - Rp) sesuai jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penambahan Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	2023 (Rp)
Serah Terima Kas Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Piutang/Beban Dibayar Dimuka Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Persediaan Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Aset Tetap Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Aset Lainnya Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Kewajiban/Utang/Pendapatan Diterima Dimuka Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Koreksi saldo awal Aset tetap (mutasi masuk antar SKPD tahun-tahun sebelumnya) - KOR+MM	
Koreksi saldo awal (inventarisasi barang belum tercatat/berlebih) - KOR+LBH	
Koreksi saldo awal Aset tetap (hibah masuk tahun-tahun sebelumnya) - KOR+HBM	
Koreksi saldo awal Aset tetap (atribusi nilai sertifikat tanah tahun-tahun sebelumnya) - KOR+SER	
Koreksi saldo awal Aset tetap (hilang pencatatan) - KOR+HCTT	
Koreksi saldo awal Aset tetap (Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi) - KOR+/-TKAP	
Koreksi saldo awal Aset tetap (Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi) - KOR+NKAP	
Koreksi saldo awal (pencatatan penilaian barang hasil inventarisasi) - KOR+NILAI	
Koreksi saldo awal tambah (reklasifikasi aset tetap penyesuaian kode permendagri 108)	
Pencatatan mutasi masuk aset tetap dari OPD - MM	
Penyesuaian akumulasi penyusutan mutasi keluar aset tetap	
Mutasi Masuk Barang Rusak Berat antar SKPD	
Koreksi saldo awal Utang Jangka Pendek Lainnya karena	
Koreksi saldo persediaan awal	
Mutasi masuk barang persediaan dari SKPD/Unit ...	
Koreksi saldo awal kas	
Koreksi Saldo Awal Utang Lebih Bayar DBH Pusat	
koreksi saldo awal salah pencatatan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD Lembaga Keuangan	
Koreksi saldo awal TGR yang tercatat di aset lainnya	
Jumlah	-

2. Pengurangan Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	2023 (Rp)
Serah Terima Kas Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Piutang/Beban Dibayar Dimuka Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Persediaan Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Aset Tetap Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Aset Lainnya Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	

Serah Terima Kewajiban/Utang/Pendapatan Diterima Dimuka Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Koreksi saldo awal Aset tetap (penghapusan tahun-tahun sebelumnya) - KOR-HPS	
Koreksi saldo awal Aset tetap (mutasi keluar antar SKPD tahun-tahun sebelumnya) - KOR-MUT	
Koreksi saldo awal Aset tetap (perubahan batas nilai kapitalisasi) - KOR-NKAP	
Koreksi saldo awal kurang (pemeliharaan tahun-tahun sebelumnya) - KOR-PEMEL	
Koreksi saldo awal Aset tetap (dobel pencatatan) - KOR-DOB	
Koreksi saldo awal Aset tetap (seharusnya merupakan barang habis pakai tahun-tahun sebelumnya) - KOR-BHP	
Koreksi saldo awal Aset tetap (hibah keluar tahun-tahun sebelumnya) - KOR-HB	
Koreksi saldo awal kurang (reklasifikasi aset tetap penyesuaian kode permendagri 108)	
Koreksi saldo awal kurang (pengurangan nilai KDP)	
Pencatatan mutasi keluar aset tetap ke OPD - MUT	
Penghapusan barang Baik (B)/Rusak Ringan (RR) - HPS	
Koreksi saldo akumulasi penyusutan awal Aset tetap	
Penyesuaian akumulasi penyusutan mutasi masuk aset tetap	
Koreksi saldo awal aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD) karena	
Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Barang RB/TD	
Koreksi saldo awal Akumulasi Amortisasi ATB	
Mutasi Keluar Barang Rusak Berat antar SKPD	
Penghapusan Aset Lain-Lain - Aset Tidak Berwujud Software	
Koreksi saldo awal utang belanja karena	
Mutasi keluar barang persediaan ke SKPD/Unit	
Koreksi saldo awal beban dibayar di muka	
Penyesuaian/koreksi saldo awal Pendapatan diterima di muka	
Koreksi Saldo Awal Piutang DBH Pajak Pusat karena salah catat	
Penghapusan piutang	
Jumlah	-

3.4 PENJELASAN POS-POS NERACA

3.4.1 ASET

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Th. 2023	Th. 2022
ASET		
1. Aset Lancar		
2. Aset Tetap		
3. Aset Lainnya		
Jumlah Aset		
KEWAJIBAN & EKUITAS		
1. Kewajiban		
2. Ekuitas		
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas		

1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun dihitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Th. 2023	Th. 2022
Kas		
Piutang		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		
Persediaan		
Beban Dibayar Dimuka		
Jumlah Aset Lancar		

A. KAS

Saldo kas terdiri atas Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di JKN dan Kas Lainnya dengan rincian sesuai tabel berikut:

Uraian	Th. 2023	Th. 2022
KAS		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Jumlah	-	-

Saldo Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp dan Saldo Kas tahun 2022 sebesar Rp terdiri atas :

- 1) Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai/kas di rekening giro yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp Kas tersebut merupakan :
 - a) ...
 - b) ...
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebesar Rp , Kas tersebut merupakan :
 - a) ...
 - b) ...
- 3) Kas BLUD Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan kas dan setara kas yang digunakan untuk pengelolaan penerimaan pendapatan dan biaya yang

berasal dari hasil operasional BLUD, sebesar Rp

Rinci Kas di BLUD Puskesmas adalah sebagai berikut :

- BLUD Puskesmas Puskesmas	: Rp
- BLUD Puskesmas Puskesmas	: Rp
- BLUD Puskesmas Puskesmas	: Rp
- BLUD Puskesmas Puskesmas	: Rp
- BLUD Puskesmas Puskesmas	: Rp
Jumlah	Rp

4) Kas di Bendahara BOS merupakan Kas BOS sebesar Rp merupakan Dana BOS yang berada pada masing-masing sekolah di lingkungan Kabupaten Brebes. Dengan rincian sebagai berikut :

- SD : Rp pada SD Negeri
- SMP : Rp padaSMP Negeri

5) Kas Lainnya, merupakan Kas

B. PIUTANG

Saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp dengan rincian dijelaskan sesuai lampiran :

Jenis Piutang	Th. 2023	Th. 2022
Piutang Pendapatan :		
Piutang Pajak Daerah		
Piutang Retribusi Daerah		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya :		
Piutang Lainnya		
Jumlah		

1) Piutang Pendapatan

a) Piutang Pajak Daerah

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan pajak daerah, sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum diterima, Saldo Piutang Pajak Daerah sebesar Rp dengan rincian sesuai tabel berikut :

Piutang Pajak :	Th. 2023	Th. 2022
Piutang Pajak Hotel		
Piutang Pajak Restoran		
Piutang Pajak Hiburan		
Piutang Pajak Reklame		

Piutang Pajak Penerangan Jalan		
Piutang Pajak Parkir		
Piutang Pajak Air Tanah		
Piutang Pajak Sarang Burung Walet		
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)		
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		
Piutang Pajak Lingkungan		
Jumlah		

Mutasi Piutang Pajak dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo awal Piutang Pajak	
Penambahan :	
a. Penambahan piutang baru	
b. Koreksi tambah/salah catat saldo piutang tahun lalu	
c. dst	
Pengurangan :	
a. Setoran piutang tahun berjalan	
b. Koreksi kurang/salah catat saldo tahun lalu	
c..... dst	
Saldo Akhir Piutang Pajak	

Rincian Mutasi Piutang Pajak dijelaskan sebagai berikut :

Uraian Penambahan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Penambahan piutang transaksi 2023		
a. Piutang pajak		
b. Piutang pajak		
c. Piutang pajak		
Jumlah		

Uraian Penambahan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Koreksi tambah/salah catat saldo piutang tahun lalu		
a. Piutang pajak		(contoh: koreksi kurang catat)
b. Piutang pajak		
c. Piutang pajak		
Jumlah		

Uraian Pengurangan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Setoran piutang tahun berjalan		
a. Piutang pajak		

b. Piutang pajak		
c. Piutang pajak		
Jumlah		

Uraian Pengurangan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Koreksi kurang/salah catat saldo tahun lalu		
a. Piutang pajak		(contoh: koreksi lebih catat)
b. Piutang pajak		(contoh: koreksi pembatalan SKPD/kesalahan SKPD)
c. Piutang pajak		
Jumlah		

b) Piutang Retribusi Daerah

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan retribusi daerah, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum diterima, Saldo Rekening Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp dengan rincian sesuai tabel berikut :

Piutang Retribusi Daerah :	Th. 2023	Th. 2022
Piutang Retribusi Jasa Umum		
Piutang Retribusi Jasa Usaha		
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu		
Jumlah		

Mutasi Piutang Retribusi dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo awal Piutang Retribusi	
Penambahan :	
a. Penambahan piutang baru	
b. Koreksi tambah/salah catat saldo piutang tahun lalu	
c. dst	
Pengurangan :	
a. Setoran piutang tahun berjalan	
b. Koreksi kurang/salah catat saldo tahun lalu	
c..... dst	
Saldo Akhir Piutang Retribusi	

Rincian Mutasi Piutang Retribusi dijelaskan sebagai berikut :

Uraian Penambahan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Penambahan piutang baru		

Uraian Penambahan :	Nilai (Rp)	Keterangan
a. Piutang retribusi		
b. Piutang retribusi		
c. Piutang retribusi		
Jumlah		

Uraian Penambahan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Koreksi tambah/salah catat saldo piutang tahun lalu		
a. Piutang retribusi		(contoh: koreksi kurang catat)
b. Piutang retribusi		
c. Piutang retribusi		
Jumlah		

Uraian Pengurangan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Setoran piutang tahun berjalan		
a. Piutang retribusi		
b. Piutang retribusi		
c. Piutang retribusi		
Jumlah		

Uraian Pengurangan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Koreksi kurang/salah catat saldo tahun lalu		
a. Piutang retribusi		(contoh: koreksi lebih catat)
b. Piutang retribusi		(contoh: koreksi pembatalan SKPD/kesalahan SKPD)
c. Piutang retribusi		
Jumlah	-	

c) Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum diterima. Saldo piutang dimaksud adalah Rp . Rincian Piutang tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :	Th. 2023	Th. 2022
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN		
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :	Th. 2023	Th. 2022
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta		
Jumlah		

d) Piutang Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Th. 2023	Th. 2022
Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		
Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		
Piutang Hasil Kerja Sama Daerah		
Piutang Jasa Giro		
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
Piutang Pendapatan Bunga		
Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		
Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing		
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah		
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah		
Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		
Piutang Pendapatan dari Pengembalian		
Piutang Pendapatan BLUD		
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		
Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		
Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		
Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf		
Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan		
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah		
Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya		
Jumlah		

Penjelasan :

- a. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan piutang pokok dana bergulir yang dikelola SKPD berupa pinjaman modal dana/peralatan mesin kepada pihak ke-3 tahun sebesar Rp

- b. Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan piutang atas kehilangan barang milik daerah berupa sesuai SKTJM/SK pembebanan a.n sebesar Rp..... Pengurangan dari saldo 2022 merupakan setoran dan penambahan saldo 2023 merupakan penetapan kerugian daerah baru a.n dengan SKTJM.
- c. Piutang Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan piutang denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik oleh penyedia jasa dan belum diterima sampai dengan akhir periode akuntansi. Daftar Piutang Keterlambatan Pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Nama Pihak Ke-3	Nilai (Rp)
1			
2			
3			
	Jumlah		

- d. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp merupakan piutang kepada wajib pajak atas denda keterlambatan pembayaran pajak. Rinciannya dijelaskan pada tabel berikut :

No	Uraian	Tahun Pajak	Nilai (Rp)
1	Pajak		
2	Pajak		
3	Pajak		
	Jumlah	-	-

- e. Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp..... merupakan piutang kepada wajib retribusi atas denda keterlambatan pembayaran retribusi. Rinciannya dijelaskan pada tabel berikut :

No	Uraian	Tahun Retribusi	Nilai (Rp)
1	Retribusi		
2	Retribusi		
3	Retribusi		
	Jumlah	-	-

- f. Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp..... merupakan Piutang Jaminan atas pekerjaan tahun pekerjaan oleh penyedia jasa a.n
- g. Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp merupakan piutang atas kelebihan pembayaran belanja kepada yang belum dikembalikan kepada Pemkab Brebes.

h. Piutang Pendapatan BLUD

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan daerah dari aktivitas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum diterima. Saldo piutang dimaksud per tanggal tersebut adalah Rp..... Rincian Piutang BLUD adalah sebagai berikut :

Uraian	2023	2022
1. BLUD		
Piutang BPJS		
Piutang		
Piutang		
Jumlah 1		
2. BLUD		
Piutang BPJS		
Piutang		
Piutang		
Jumlah 2		
Total		

(uraian/nama BLUD boleh ditambah)

- i. Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp merupakan piutang kepada atas keterlambatan pembayaran pemanfaatan BMD
- j. Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan piutang jasa dana bergulir yang dikelola SKPD berupa pinjaman modal dana/peralatan mesin kepada pihak ke-3 tahun sebesar Rp.....
- k. Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan piutang jasa dana bergulir yang dikelola SKPD berupa pinjaman modal dana/peralatan mesin kepada pihak ke-3 tahun sebesar Rp.....
- l. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp..... merupakan piutang pemanfaatan BMD yang belum diterima pembayarannya per 31 Desember 2023. Rinciannya dijelaskan sesuai tabel berikut :

No	Uraian	Nama Pihak Ke-3	Nilai (Rp)
1	Piutang pemanfaatan tanah		
2	Piutang pemanfaatan bangunan		
3	Dst ...		
	Jumlah		

e) Piutang Transfer

Piutang Transfer sebesar Rp dirinci sebagai berikut :

Piutang Transfer :	Th. 2023	Th. 2022
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Jumlah		

Rincian Piutang Transfer dijelaskan sesuai tabel berikut :

1. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Th. 2023	Th. 2022
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Dana Perimbangan		
Piutang Dana Insentif Daerah (DID)		
Piutang Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur		
Piutang Dana Keistimewaan		
Piutang Dana Desa		
Piutang Transfer Dana Penyesuaian		
Piutang Transfer Lainnya		
Piutang Pendapatan Lainnya		
Jumlah		

2. Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah

Uraian	Th. 2023	Th. 2022
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Bagi Hasil		
Piutang Bantuan Keuangan		
Piutang Pendapatan Hibah		
Piutang Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis		
Piutang Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana		
Piutang Pendapatan Hibah Dana BOS		
Piutang Pendapatan atas Pengembalian Hibah		
Jumlah		

Penjelasan :

- a. Piutang Bagi Hasil sebesar Rp dengan rincian :
 - 1) Piutang
 - 2) Piutang
 - 3) Piutang
- b. Piutang Bantuan Keuangan sebesar Rp dengan rincian :
 - 1) Piutang

- 2) Piutang
- 3) Piutang

4) Piutang Lainnya

Rincian Piutang Lainnya dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian	Th. 2023	Th. 2022
Piutang Lainnya		
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Uang Muka		
Jumlah		

Penjelasan :

- a. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang sebesar NIHIL
- b. Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang sebesar NIHIL
- c. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar NIHIL
- d. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas Putang TP-TGR yang akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Bagian Lancar ini merupakan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian yang telah ditetapkan dengan SKTJM atau Keputusan Pembebanan. Rincian Bagian Lancar TP-TGR dijelaskan sesuai tabel berikut :

Nama Bendahara/Pihak Yang Merugikan	Th. 2023	Th. 2022
Jumlah		

Pengurangan dari saldo 2022 merupakan setoran dan penambahan saldo 2023 merupakan penetapan kerugian daerah baru a.n dengan SKTJM.

- f) Uang Muka sebesar NIHIL

C. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dirinci sesuai penjelasan berikut :

1) Penyisihan Piutang Pendapatan

Jenis Piutang	Th. 2023	Th. 2022
Penyisihan Piutang Pendapatan		
Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
Penyisihan Piutang Retribusi		
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah		
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya		
Jumlah		

2) Penyisihan Piutang Lainnya

Jenis Piutang	Th. 2023	Th. 2022
Penyisihan Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bank		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman melalui BLUD		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka		
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Jumlah	-	-

D. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Rekening ini merupakan biaya yang belum merupakan kewajiban Pemkab Brebes untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu dan barang/jasa atas pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga. Saldo sebesar Rp dengan rincian dijelaskan pada tabel berikut :

Uraian	Th. 2023	Th. 2022
Jumlah		

Penjelasan :

- 1) Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp dibayar tanggal dengan jangka waktu bulan/tahun. Saldo yang telah menjadi beban sebesar Rp dan saldo yang merupakan beban dibayar di muka sebesar Rp
- 2) Dst

E. PERSEDIAAN

Rekening ini menggambarkan harga perolehan persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dengan rincian saldo per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

Persediaan :	Th. 2023	Th. 2022
Bahan		
Suku Cadang		
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
Obat-obatan		
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga		
Natura dan Pakan		
Persediaan Penelitian		
Persediaan Dalam Proses		
Persediaan Barang BOS		
Jumlah		

Penambahan dan pengurangan selama tahun 2023 dijelaskan pada tabel berikut :

Persediaan :	Saldo 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2023
Bahan				
Suku Cadang				
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor				
Obat-obatan				
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan				
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga				
Natura dan Pakan				
Persediaan Penelitian				
Persediaan Dalam Proses				
Persediaan Barang BOS				
Jumlah				

Mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2023 secara rinci dijelaskan pada tabel berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
SALDO AWAL	

Uraian	Nilai (Rp)
Koreksi (+) Saldo Awal	
Pengadaan / Pembelian	
Reklas Dari Belanja Tdk Terduga	
Reklas Dari B. Modal	
Reklas Dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Reklas Dari B. Pegawai	
Reklas Dari B. Jasa	
Reklas Dari Pemeliharaan	
Mutasi / Transfer Masuk	
Hibah Masuk	
Hutang Persediaan	
Reklas Antar Beban Persediaan (+)	
Jumlah Penambahan	
Koreksi (-) Saldo Awal	
Pemakaian	
Mutasi Keluar	
Hibah Keluar	
Reklas Ke Aset Tetap	
Reklas Ke Ekstrakomtabel	
Reklas Ke Belanja Pegawai	
Reklas Ke Belanja Jasa	
Reklas Ke Belanja Pemeliharaan	
Pindah Ke Kadaluarsa/-Rusak	
Reklas Antar Beban Persediaan (-)	
Jumlah Pengurangan	
SALDO AKHIR PERSEDIAAN	

Saldo persediaan tidak termasuk di dalamnya persediaan yang telah kadaluarsa dan rusak. Mutasi barang kadaluarsa dan rusak selama tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Persediaan Kadaluarsa/Usang/Rusak	Saldo 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2023
Bahan				
Suku Cadang				
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor				
Obat-obatan				
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan				
Persediaan Utk Tujuan Strategis/ Bergaja-jaga				
Natura dan Pakan				
Persediaan Penelitian				
Persediaan Dalam Proses				
JUMLAH				

Penambahan sebesar Rp terdiri dari :

a. Barang persediaan yang semula merupakan barang aktif namun pada tahun 2023 telah

- dinyatakan kadaluarsa/using/rusak disahkan dengan berita acara nomor sebesar Rp.
- b. Penambahan barang kadaluarsa/using/rusak karena koreksi pencatatan sebesar Rp .

Pengurangan sebesar Rp terdiri dari :

- a. Penghapusan barang kadaluarsa/using/rusak sebesar Rp
- b. Pengurangan karena koreksi pencatatan sebesar Rp

F. INVESTASI JANGKA PANJANG

Terdiri dari :

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar NIHIL
- b. Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) kepada perusahaan daerah. Nilai ini berasal dari penambahan nilai penyertaan modal selama tahun 2023 dengan perhitungan metode ekuitas dan metode biaya.

Saldo PMPD masing-masing perusahaan daerah adalah sebagai berikut :

No.	Perusahaan Daerah	Saldo Th. 2023	Saldo Th. 2022
	PMPD PADA LEMBAGA KEUANGAN - BANK :		
1	BPD Bank Jateng		
2	BKK Jateng		
3	PD. BPR BKK Banjarharjo		
4	PD BPR Bank Brebes (Bank Puskpakencana)		
	PMPD PADA PERUSAHAAN DAERAH :		
1	PDAM Tirta Baribis		
2	Perusda Perbengkelan		
3	Perusda Percetakan		
4	Perusda Farmasi Dan Sarana Kesehatan		
5	PRPP Jawa Tengah - Semarang		
	JUMLAH		

Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal tahun 2023 dijelaskan dalam tabel berikut :

No.	Perusahaan Daerah	Modal Saham Pemkab Brebes Th. 2022	Penyertaan Modal 2023	Modal Saham Pemkab Brebes Th. 2023
	PMPD PADA LEMBAGA KEUANGAN - BANK :			
1	BPD Bank Jateng			
2	BKK Jateng			
3	PD. BPR BKK Banjarharjo			
4	PD BPR Bank Brebes (Bank Puskpakencana)			
	PMPD PADA PERUSAHAAN DAERAH :			
1	PDAM Tirta Baribis			
2	Perusda Perbengkelan			
3	Perusda Percetakan			
4	Perusda Farmasi Dan Sarana Kesehatan			
5	PRPP Jawa Tengah - Semarang			

JUMLAH			
---------------	--	--	--

Investasi Jangka Panjang Permanen sesuai metode pencatatannya dijelaskan sebagai berikut :

1) Metode Ekuitas

Perhitungannya dijelaskan pada tabel berikut :

No.	Perusahaan Daerah	Saldo PMPD th. 2023	Total Ekuitas	% Kepemilikan Daerah	Saldo PMPD th 2023
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
	PMPD PADA LEMBAGA KEUANGAN - BANK :				
1	PD. BPR BKK Banjarharjo				
2	PD BPR Bank Brebes (Bank Puskpakencana)				
	PMPD PADA PERUSAHAAN DAERAH :				
1	PDAM Tirta Baribis				
2	Perusda Perbengkelan				
3	Perusda Percetakan				
4	Perusda Farmasi Dan Sarana Kesehatan				
	J u m l a h				

2) Metode Biaya

Perhitungannya dijelaskan pada tabel berikut :

No.	Perusahaan Daerah	Saldo PMPD Th. 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo PMPD Th. 2023
1	BPD Bank Jateng				
2	BKK Jateng				
3	PRPP Jawa Tengah - Semarang				
	J u m l a h				

G. ASET TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN

1. Aset Tetap

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Brebes berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset tetap yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes per 31 Desember 2023 dan 2022. Perolehan aset tetap berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang didalamnya termasuk pengadaan aset tetap dalam tahun anggaran berkenaan dan/atau perolehan lainnya yang sah. Belanja yang tidak dikapitalisasi berdasarkan kebijakan akuntansi adalah Belanja Perjalanan Dinas, Belanja ATK, penggandaan dan sejenisnya.

Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp dan Rp dengan rincian sebagai berikut :

Aset Tetap :	Th. 2023	Th. 2022
a. Tanah		
b. Peralatan dan Mesin		
c. Gedung dan Bangunan		
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
e. Aset Tetap Lainnya		
f. Konstruksi dalam Pekerjaan		
g. Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		

Mutasi aset tetap tahun 2023 sebagai berikut :

URAIAN JENIS	SALDO 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 2023
a. Tanah				
b. Peralatan dan Mesin				
c. Gedung dan Bangunan				
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
e. Aset Tetap Lainnya				
f. Konstruksi dalam Pekerjaan				
JUMLAH				

1) Rincian **mutasi penambahan** aset tahun 2023 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Penambahan :	
1	Belanja Modal	
2	Reklas Dari B. Pegawai	
3	Reklas Dari B. Jasa	
4	Reklas Dari B. Persediaan	
5	Reklas Dari B. Pemeliharaan	
6	Reklas Dari Persediaan Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ke-3	
7	Hibah Masuk (Pemerintah Pusat)	
8	Hibah Masuk (Pemerintah Provinsi)	
9	Hibah Masuk (Pihak Ke-3)	
10	Hibah Masuk (Komite Sekolah)	
11	Mutasi Masuk	
12	Hutang Aset	
13	Reklas Dari Aset Lainnya (Rusak Berat)	
14	Reklas Dari Aset Lainnya (Detail Engineering)	
15	Reklas Aset Tetap Dari KDP	
16	Koreksi Tambah (Mutasi Masuk Tahun Sebelumnya)	
17	Koreksi Tambah (Inventarisasi Barang Belum Tercatat/Berlebih)	
18	Koreksi Tambah (Hibah Masuk Tahun Sebelumnya)	
19	Koreksi Tambah (Atribusi Nilai Sertifikat Tanah Tahun Sebelumnya)	
20	Koreksi Tambah (Hilang Pencatatan)	
21	Koreksi Tambah (Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi)	
22	Koreksi Tambah (Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi)	

NO	URAIAN	JUMLAH
23	Koreksi Tambah (Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap)	
24	Koreksi Tambah (Penilaian Aset Tetap)	
25	Koreksi Tambah (Reklasifikasi Detail Engineering Ke Aset Tetapnya Tahun Sebelumnya)	
26	Koreksi Tambah (.....)	
	Jumlah Penambahan	-

Penjelasan :

- a) Hibah masuk dari Pemerintah Pusat berupa senilai Rp .
- b) Hibah masuk dari Pemerintah Provinsi berupa senilai Rp .
- c) Hibah masuk dari Pemerintah Pihak ke-3 berupa senilai Rp .
- d) Hutang Aset berupa senilai Rp yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum dibayar.
- e) Koreksi hibah masuk tahun sebelumnya berupa Hibah dari senilai Rp .
- f) Koreksi tambah berupa senilai Rp .
- g) Dst...

2) Rincian **mutasi pengurangan** aset tahun 2023 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Pengurangan :	
1	Extrakomtable	
2	Reklas Ke B. Persediaan	
3	Reklas Ke B. Pemeliharaan	
4	Reklas Ke B. Perjalanan Dinas	
5	Reklas Ke B. Pegawai	
6	Reklas Ke B. Jasa	
7	Belanja Modal Untuk Pembayaran Hutang	
8	Hibah Keluar	
9	Mutasi Keluar	
10	Reklas Dari KDP Ke Aset Tetap	
11	Rusak Berat (RB)	
12	Tidak Ditemukan (TD)	
13	Penghapusan Barang B/RR	
14	Reklas Ke Aset Tidak Berwujud (ATB)	
15	Koreksi Kurang (Penghapusan Tahun Sebelumnya)	
16	Koreksi Kurang (Mutasi Keluar Antar Opd Tahun Sebelumnya)	
17	Koreksi Kurang (Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi)	
18	Koreksi Kurang (Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi)	
19	Koreksi Kurang (Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap)	
20	Koreksi Kurang (Pemeliharaan Tahun Sebelumnya)	
21	Koreksi Kurang (Dobel Pencatatan)	
22	Koreksi Kurang (BHP Tahun Sebelumnya)	
23	Koreksi Kurang (Hibah Keluar Tahun Sebelumnya)	
24	Koreksi Kurang (.....)	
	Jumlah Pengurangan	-

Penjelasan :

- a) Hibah keluar dari Pemerintah Pusat berupa senilai Rp .
- b) Hibah keluar dari Pemerintah Provinsi berupa senilai Rp .
- c) Hibah keluar dari Pemerintah Pihak ke-3 berupa senilai Rp .

- d) Koreksi hibah keluar tahun sebelumnya berupa Hibah dari senilai Rp
- e) Koreksi kurang berupa senilai Rp
- f) Dst...

3) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp dan Rp Adapun rincian Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Nama Rekanan	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Kemajuan Fisik (%)	Nominal KDP (Rp)	Nominal Terhutang (Rp)
<i>Pekerjaan</i>						
<i>Pekerjaan</i>						
<i>Pekerjaan</i>						
Jumlah						

Penjelasan :

- a) Pekerjaan tersebut bersumber dana dari dan dilaksanakan dengan jangka waktu pelaksanaan hari. Nilai kontrak sebesar Rp, nilai KDP tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp, dan nilai terhutang sebesar Rp
- b) Pekerjaan tersebut bersumber dana dari dan dilaksanakan dengan jangka waktu pelaksanaan hari. Nilai kontrak sebesar Rp, nilai KDP tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp, dan nilai terhutang sebesar Rp
- c) Pekerjaan tersebut bersumber dana dari dan dilaksanakan dengan jangka waktu pelaksanaan hari. Nilai kontrak sebesar Rp, nilai KDP tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp, dan nilai terhutang sebesar Rp

Mutasi Penambahan/Pengurangan KDP tahun 2023 dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian Pekerjaan	Saldo 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2023	Ket
<i>Pekerjaan</i>					<i>(contoh) Fisik telah selesai</i>
<i>Pekerjaan</i>					<i>(contoh) Penghapusan</i>
<i>Pekerjaan</i>					
<i>Pekerjaan</i>					
JUMLAH					

2. Akumulasi Penyusutan

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2023 tidak termasuk penyusutan atas aset tetap yang telah diusulkan penghapusannya dan telah dipindahbukukan ke kelompok Aset Lainnya akun Aset Lain-lain.

Mutasi Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2022 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Jumlah				

Penambahan akumulasi penyusutan selama tahun 2023 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	Beban Penyusutan	Hibah Masuk	Mutasi Masuk	Koreksi Tambah	Jumlah Penambahan
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin					
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan					
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan					
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya					
Jumlah					

Pengurangan akumulasi penyusutan selama tahun 2023 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	Penghapusan	Mutasi Keluar	Koreksi Kurang	Jumlah Pengurangan
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Jumlah				

H. DANA CADANGAN

Saldo Dana Cadangan Tahun 2023 sebesar NIHIL

I. ASET LAINNYA

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp dan Rp dengan rincian :

ASET LAINNYA	Saldo Th. 2023	Saldo Th. 2022
Tagihan Jangka Panjang		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tidak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah	-	-

1. Tagihan Jangka Panjang tahun 2023 sebesar Rp
2. Aset Tak Berwujud

Aset tersebut merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp . Saldo tersebut berupa software/aplikasi.

Penambahan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut :

 - a. Pengadaan software/aplikasi sebesar Rp
 - b. Koreksi salah catat saldo tahun sebelumnya sebesar Rp
 - c. dst ...

Pengurangan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut :

 - a. Penghapusan software/aplikasi sebesar Rp
 - b. Koreksi pengurangan karena salah catat saldo tahun sebelumnya sebesar Rp
 - c. dst ...
3. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp. Mutasi terdiri atas :

 - a. Saldo awal Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp
 - b. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp
 - c. Koreksi penambahan Amortisasi Aset Tidak Berwujud salah catat saldo tahun lalu sebesar Rp
 - d. Koreksi pengurangan Amortisasi Aset Tidak Berwujud salah catat saldo tahun lalu sebesar Rp
 - e. dst ...
4. Aset Lain-lain Rp terdiri atas :
 - a. Aset tetap Rusak Berat (RB)/TD saldo sebesar Rp
 - b. Aset tetap yang telah tidak digunakan dalam operasional pemerintah saldo sebesar Rp .

Mutasi Aset Lain-lain dijelaskan pada tabel berikut :

Uraian	Saldo 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2023
Aset Tetap Rusak Berat/TD				
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah				

Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat				
Jumlah				

- 1) Penambahan Barang RB/TD sebesar Rp
- 2) Pengurangan barang RB/TD sebesar Rp
 - a) Pengurangan karena penghapusan sebesar Rp . Atas barang-barang tersebut yang telah dihapusbukukan dan tidak tercatat pada KIB.
 - b) Pengurangan karena koreksi salah catat sebesar Rp .
- c. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah :
 - 1) Detail Engineering (DE) yang tercatat pada Aset Lain-lain sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Saldo 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2023
DE				
Jumlah				

- a) Penambahan merupakan DE 2023 yang belum direalisasikan pekerjaan fisiknya sebesar Rp
 - b) Pengurangan merupakan saldo DE tahun sebelumnya yang telah direklasifikasi ke aset tetap dan telah menambah nilai fisik yang berkenaan sebesar Rp
 - c) Pengurangan saldo DE tahun sebelumnya yang telah direklasifikasi ke aset tetap lainnya buku sebesar Rp
 - d) Pengurangan Saldo DE tahun sebelumnya yang dihapuskan karena batal digunakan Rp
- 2) Barang Hibah Keluar yang belum dihapuskan sebesar Rp dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga Satuan	Nilai (Rp)
Jumlah				

Mutasi Barang Hibah Keluar yang Belum Dihapuskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2023
Barang Hibah Keluar yang Belum Dihapus				
Akumulasi Penyusutan Barang Hibah Keluar yang Belum Dihapus				
Jumlah				

Barang hibah keluar yang belum dihapus merupakan barang yang telah

dihibahkan kepada namun sampai dengan akhir tahun 2023 belum dihapuskan.

- 3) Barang berlebih yang belum dinilai sebesar Rp , dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga Satuan	Nilai (Rp)
Jumlah				

Mutasi Barang berlebih belum dinilai sebagai berikut :

Uraian Barang	Saldo 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2023
Jumlah				

d. Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat/TD

Uraian	Saldo 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2023
Jumlah				

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Barang RB/TD merupakan Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang RB/TD dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penambahan karena pindah kondisi dari Barang Baik (B) ke Rusak Berat (RB) sebesar Rp .
- 2) Penambahan karena koreksi salah catat saldo tahun sebelumnya sebesar Rp .
- 3) Pengurangan karena penghapusan sebesar Rp .
- 4) Pengurangan karena koreksi salah catat saldo tahun sebelumnya sebesar Rp .

3.4.2 Kewajiban

3.4.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dengan saldo masing-masing sebesar Rp dan Rp dapat dirinci sebagai berikut :

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :	Saldo Th. 2023	Saldo Th. 2022
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah		

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo rekening Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp merupakan :

- a. Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran akan tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, berupa
 - 1) Pajak.....sebesar Rp
 - 2) Pajak..... sebesar Rp
- b. Potongan Gaji yang belum disetorkan kepada pihak ke-3, berupa :
 - 1) Taspen sebesar Rp
 - 2) Iurang Jaminan Kesehatan sebesar Rp
 - 3) Iurang Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp
 - 4) Iurang Jaminan Kecelakaan Kematian sebesar Rp
 - 5) Taperum sebesar Rp
 - 6) Iuran Wajib Pegawai sebesar Rp
- c. Belanja yang telah direalisasikan namun belum dibayar kepada pihak ke-3 dan kas nya masih berada di rekening Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp
- d. *Dst (disesuaikan dengan kondisi SKPD)*

2. Utang Bunga

Utang Bunga merupakan reklasifikasi bagian lancar dari bunga pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2023 adalah NIHIL

3. Utang Pinjaman Jangka Pendek

Utang ini per 31 Desember 2023 bersaldo NIHIL

4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi bagian lancar dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran. dengan saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar NIHIL .

5. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian

barang/jasa belum diserahkan kepada pihak lain. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka sebesar per 31 Desember 2023 sebesar Rp

Uraian Pendapatan Diterima di Muka	Saldo Th. 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Th. 2023
Jumlah				

Mutasi pendapatan diterima dimuka tahun 2023 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Uraian Kegiatan :	
Penerimaan pendapatan, diterima pada tanggal untuk jangka waktu	
Saldo Awal	
Penambahan :	
a. Penambahan PDDM	
b. Koreksi tambah salah catat saldo tahun sebelumnya	
Jumlah Penambahan	
Pengurangan :	
a. PDDM tahun sebelumnya yang telah menjadi pendapatan	
b. Koreksi kurang salah catat saldo tahun sebelumnya	
Jumlah Pengurangan	
Saldo Akhir	

6. Utang Belanja

Utang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Beban Pegawai dan Beban Barang tahun anggaran sebelumnya namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2022 sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo Th. 2023	Saldo Th. 2022
Utang Belanja Pegawai		
Utang Belanja Barang dan Jasa - Persediaan		
Utang Belanja Barang dan Jasa - Pemeliharaan		
Utang Belanja Barang dan Jasa - Jasa		
Utang Belanja Barang dan Jasa - Perjalanan Dinas		
Utang Belanja Bunga		
Utang Belanja Subsidi		

Uraian	Saldo Th. 2023	Saldo Th. 2022
Utang Belanja Hibah		
Utang Belanja Tidak Terduga		
Utang Belanja Bagi Hasil		
Utang Belanja Bantuan Keuangan		
Utang Belanja Bantuan Sosial		
Utang Beban Lain-lain		
Jumlah	-	-

Utang Belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan :

- a. Utang Belanja Pegawai merupakan :
 - 1) Utang TPP bulan Desember 2022 sebesar Rp
 - 2) Utang Upah Pungut Pajak/retribusi triwulan IV sebesar Rp
 - 3) Koreksi salah catat tahun sebelumnya sebesar Rp
- b. Utang Belanja Barang/Persediaan merupakan:
 - 1) Utang atas pengadaan obat-obatan sebesar Rp
 - 2) Utang atas pengadaan sebesar Rp
 - 3) Utang atas pengadaan natura dan pakan sebesar Rp
- c. Utang Belanja Pemeliharaan merupakan:
 - 1) Utang atas Pemeliharaansebesar Rp
 - 2) Utang atas Pemeliharaansebesar Rp
 - 3) Koreksi salah catat tahun sebelumnya sebesar Rp
- d. Utang Belanja Jasa merupakan :
 - 1) Utang atas belanja Telepon sebesar Rp
 - 2) Utang atas belanja Air sebesar Rp
 - 3) Utang atas belanja Internet sebesar Rp
 - 4) Utang atas belanja Jasa Tenaga BLUD sebesar Rp
 - 5) Koreksi salah catat tahun sebelumnya sebesar Rp
- e. Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp

2. Pengurangan :

- a. Utang Belanja Pegawai merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut :
 - 1) Utang TPP bulan Desember 2022 sebesar Rp
 - 2) Utang Upah Pungut Pajak/retribusi triwulan IV sebesar Rp
 - 3) Koreksi salah catat tahun sebelumnya sebesar Rp
- b. Utang Belanja Barang/Persediaan merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut :
 - 1) Utang atas pengadaan obat-obatan sebesar Rp
 - 2) Utang atas pengadaan sebesar Rp
 - 3) Utang atas pengadaan natura dan pakan sebesar Rp
- c. Utang Belanja Pemeliharaan merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut :

- 1) Utang atas Pemeliharaansebesar Rp
 - 2) Utang atas Pemeliharaansebesar Rp
 - 3) Koreksi salah catat tahun sebelumnya sebesar Rp
- d. Utang Belanja Jasa merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut:
- 1) Utang atas belanja Telepon sebesar Rp
 - 2) Utang atas belanja Air sebesar Rp
 - 3) Utang atas belanja Internet sebesar Rp
 - 4) Utang atas belanja Jasa Tenaga BLUD sebesar Rp
 - 5) Koreksi salah catat tahun sebelumnya sebesar Rp
- e. Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp

7. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Belanja Modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai Utang Belanja namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp dan Rp .

Utang jangka pendek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang saldo tahun lalu sebesar Rp merupakan utang retensi aset tetap yang telah dikoreksi dan telah dihapuskan berdasarkan keputusan bupati nomor , sehingga saldo tahun 2023 sebesar NIHIL
2. Utang karena Putus Kontrak atas pekerjaan fisik dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Uraian KDP	Nama Rekanan	Nilai Kontrak	Kemajuan Fisik (%)	Nilai KDP	Kemajuan Keuangan (Rp)	Utang Aset Belum Dibayar
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Jumlah						

Penjelasan atas kemajuan fisik pekerjaan telah dijelaskan pada penjelasan Aset Tetap dhi. Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

3.4.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar NIHIL.

3.4.2.3 R/K PPKD

Rekening ini merupakan rekening perantara yang digunakan oleh SKPD pada saat menerima SP2D dari BUD atau menyeter kas ke BUD. Saldo R/K PPKD sebelum konsolidasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar NIHIL.

3.4.3 Ekuitas

Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dikuasai, setelah dikurangi hak pihak (*claim*) ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas pada NeracaDinas Kesehatan Kabupaten Brebes per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp dan Rp . Perubahan atas ekuitas tahun 2023 dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

PERUBAHAN EKUITAS :	NILAI (Rp)
EKUITAS AWAL	
Surplus/(Defisit)-LO	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KEALAHAN MENDASAR :	
Koreksi Nilai Persediaan	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	
Lain-lain	
EKUITAS AKHIR	

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

3.5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (khusus BLUD)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Adapun rincian perhitungan perubahan SAL tahun 2023 adalah sebagai berikut :

3.5.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Nilai SAL awal sebesar Rp merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2022. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit tahun 2023.

3.5.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2023 adalah seluruh SAL akhir tahun anggaran 2022. SAL tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp

3.5.3. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp

3.5.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai akumulatif SAL akhir pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp

3.6. Laporan Arus Kas (khusus BLUD)

3.6.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Pada Tahun 2023, terdapat Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp yang merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp dengan arus kas keluar sebesar Rp. Arus kas dari aktivitas operasi dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Penerimaan APBD		
Penerimaan BLUD		
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai		
Pembayaran Barang dan Jasa		
Pembayaran Bunga		
Pembayaran Subsidi		
Pembayaran Belanja Hibah		
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		
Pembayaran Tidak Terduga		

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		
---	--	--

3.6.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp dan Arus kas keluar sebesar Rp . Aliran kas dari aktivitas investasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin		
Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan		
Arus Kas Keluar		
Perolehan Tanah		
Perolehan Peralatan dan Mesin		
Perolehan Bangunan dan Gedung		
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Perolehan Aset Tetap Lainnya		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		

3.6.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp adalah selisih antara Arus kas masuk dan Arus kas keluar. Arus kas masuk dari aktivitas ini adalah sebesar Rp , sedangkan arus kas keluarnya adalah sebesar Rp . Aliran kas dari aktivitas pendanaan tahun 2023 dan tahun 2022 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pinjaman Daerah		
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman		
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Utang		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		

3.6.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, Beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp adalah selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp dan Arus kas keluar sebesar Rp . Aliran Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan Tahun 2022 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		

Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		

3.6.5. Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas

Kenaikan/penurunan kas bersih selama periode Tahun 2023 sebesar Rp menunjukkan adanya surplus realisasi APBD Tahun 2023 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih besar dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan kenaikan kas bersih dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi		
Arus kas bersih dari aktivitas investasi		
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan		
Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris		
Jumlah		

3.6.6. Saldo Awal Kas di BLUD

Saldo kas awal merupakan saldo kas per 31 Desember 2023 yang tercatat dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional BLUD tahun 2023. Saldo Awal Kas di BLUD sebesar Rp

3.6.7. Saldo Akhir Kas di BLUD

Saldo Akhir Kas di BLUD sebesar Rp Selisih Kas akhir yang tercatat pada Neraca dengan Kas yang tercatat pada Laporan Arus Kas sebesar Rp Selisih tersebut merupakan ...

3.7. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

Nilai surplus/(defisit) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp . Sedangkan nilai Surplus Defisit-LO sebesar Rp sehingga memiliki perbedaan sebesar Rp . Perhitungan perbedaan nilai secara keseluruhan hubungan LRA-LO dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Surplus/(Defisit) LRA	
Penambahan	

Uraian	Nilai (Rp)
Pengurangan	
Surplus/(Defisit) LO	

Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan disampaikan dalam **lampiran 3.7.1**

3.7.1. Penjelasan masing-masing pos terkait perbedaan pengakuan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

3.7.1.1. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA

Pendapatan Daerah	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan			
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			
Jumlah			

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Selisih antara Pendapatan Asli Daerah-LO dengan Pendapatan Asli Daerah-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
PENDAPATAN ASLI DAERAH			

a. Pendapatan Pajak Daerah

Selisih antara Pendapatan pajak-LO dengan pendapatan pajak-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Pajak Daerah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang pajak	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran pitang tahun sebelumnya	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Selisih antara pendapatan retribusi-LO dengan pendapatan retribusi-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Retribusi Daerah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang retribusi	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran piutang retribusi tahun sebelumnya	
Pengurangan yang merupakan pendapatan diterima dimuka	
Selisih	

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang bagian laba/deviden	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran piutang bagian laba/deviden tahun sebelumnya	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

d. Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Lain-lain PAD yang Sah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang denda pajak	
Penambahan piutang denda retribusi	
Penambahan piutang denda keterlambatan pekerjaan	
Penambahan piutang pendapatan BLUD	
Penambahan piutang pendapatan	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran piut. pokok dana bergulir tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. jasa dana bergulir tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. denda pajak tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. denda retribusi tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. denda keterlambatan pekerjaan tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. tahun sebelumnya	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

2. PENDAPATAN TRANSFER

Selisih Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional dan LRA

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang dana bagi hasil pajak pusat	
Penambahan piutang dana bagi hasil SDA pusat	
Penambahan piutang pendapatan	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran piut. Bagi hasil pajak pusat tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. Bagi hasil SDA pusat tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. tahun sebelumnya	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Transfer Antar Daerah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang dana bagi hasil pajak provinsi	
Penambahan piutang bantuan keuangan prov	
Penambahan piutang pendapatan	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran piut. Dana bagi hasil provinsi tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. Bantuan keuangan provinsi tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. tahun sebelumnya	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

a. Pendapatan Hibah

Selisih antara Pendapatan Hibah-LO dengan Pendapatan Hibah-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Hibah-LO			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat th.	
Penambahan piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya/Prov	
Penambahan piutang Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	
Penambahan piutang Sumbangan Pihak ketiga/sejenis	
Penambahan Hibah Masuk Persediaan	
Penambahan Hibah Masuk Aset Tetap	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas penerimaan piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
Pengurangan atas penerimaan piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya/Prov	
Pengurangan atas penerimaan piutang Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	
Pengurangan atas penerimaan piutang Sumbangan Pihak ketiga/sejenis	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	-

b. Dana Darurat

Selisih antara Dana Darurat-LO dengan Dana Darurat-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Dana Darurat-LO			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang Dana Darurat	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas penerimaan piutang Dana Darurat	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Selisih antara Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO dengan Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang Pendapatan Hibah Dana BOS	
Penambahan piutang Pendapatan atas Pengembalian Hibah	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas penerimaan piutang Pendapatan Hibah Dana BOS	
Pengurangan atas penerimaan piutang Pendapatan atas Pengembalian Hibah	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

4. SURPLUS NON OPERASIONAL

a. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

1) Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO			

Selisih Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan reklasifikasi hasil penjualan BMD ke Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan (<i>khusus PPKD</i>)	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan selisih penjualan barang RB BMD	
Pengurangan selisih penghapusan/pemusnahan BMD	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

2) Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO			

Selisih Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan selisih tukar-menukar BMD	
Pengurangan selisih hibah BMD	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

3) Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO			

Selisih Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan selisih tukar-menukar BMD	
Pengurangan selisih hibah BMD	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

4) Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO			

Selisih Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang Pelepasan Investasi Jangka Pendek	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas penerimaan piutang Pelepasan Investasi Jangka Pendek	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

1) Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO			

Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan surplus penyelesaian utang pemerintah pusat	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

2) Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO			

Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Surplus Penyelesaian Utang kepada LK. Bank	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

3) Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO			

Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Surplus Penyelesaian Utang kepada LK. Bukan Bank th. 2022	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

4) Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO			

Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

5) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO			

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO dijelaskan sebagai berikut :

3.7.1.2. Pengungkapan Perbedaan Beban-LO dengan Belanja-LRA

3.7.1.2.1. Beban Operasi

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pegawai			
Beban Barang dan Jasa			
Beban Bunga			
Beban Subsidi			
Beban Hibah			
Beban Bantuan Sosial			
Beban Penyisihan Piutang			
Beban Lain-lain			
Jumlah			

1. Beban Pegawai

Selisih Beban Pegawai pada LO dan Belanja Pegawai pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan ASN			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Gaji dan Tunjangan ASN	
Penambahan koreksi catat ...	

Uraian	(Rp)
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Gaji dan Tunjangan ASN	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

b. Beban Tambahan Penghasilan ASN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Tambahan Penghasilan ASN			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Tambahan Penghasilan ASN	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Tambahan Penghasilan ASN	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

c. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

d. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	
Penambahan koreksi catat ...	

Uraian	(Rp)
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

e. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

f. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

g. Beban Pegawai BOS

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pegawai BOS			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan koreksi catat ...	

Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Selisih	

h. Beban Pegawai BLUD

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pegawai BLUD			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan koreksi catat ...	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Selisih	

2. Beban Barang dan Jasa

Selisih beban barang dan jasa pada LO dengan belanja barang dan jasa pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Persediaan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Barang			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Saldo Awal	
Penambahan Reklas dari Belanja Tak Terduga	
Penambahan Reklas Belanja Modal	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Mutasi Masuk	
Penambahan Hibah Masuk	
Penambahan Hutang Persediaan	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Persediaan	
Pengurangan Koreksi Saldo Awal	
Pengurangan Mutasi Keluar	
Pengurangan Hibah Keluar	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Ekstrakomptabel	
Pengurangan Reklas ke B. Pegawai	
Pengurangan Reklas ke B. Jasa	

Pengurangan Reklas ke B.Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Kadaluarsa/Usang/Rusak	
Selisih	

b. Beban Jasa

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Jasa			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Jasa	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Reklas dari Beban Dibayar di Muka\	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Jasa	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Dibayar di Muka	
Selisih	

c. Beban Pemeliharaan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Pemeliharaan	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	

Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Selisih	

d. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Perjalanan Dinas			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Perjalanan Dinas	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Perjalanan Dinas	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Selisih	

e. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Pengurangan Koreksi Catat ...	

Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Pengurangan Reklas ke Beban Hibah	
Pengurangan Reklas ke Beban Bantuan Sosial	
Selisih	

f. Beban Barang dan Jasa BOS

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Barang dan Jasa BOS			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Pengurangan Reklas ke Beban Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Perjalanan Dinas	
Pengurangan Reklas ke Beban Hibah	
Pengurangan Reklas ke Beban Bantuan Sosial	
Selisih	

g. Beban Barang dan Jasa BOS

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Barang dan Jasa BLUD			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Pengurangan Reklas ke Beban Pemeliharaan	

Pengurangan Reklas ke Beban Perjalanan Dinas	
Pengurangan Reklas ke Beban Hibah	
Pengurangan Reklas ke Beban Bantuan Sosial	
Selisih	

h. Beban Barang dan Jasa BLUD

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Barang dan Jasa BLUD			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklas dari Beban Dibayar di Muka	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Pengurangan Reklas ke Beban Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Perjalanan Dinas	
Pengurangan Reklas ke Beban Hibah	
Pengurangan Reklas ke Beban Bantuan Sosial	
Pengurangan Reklas dari Beban Dibayar di Muka	
Selisih	

3. Beban Bunga

Selisih beban bunga LO dengan belanja bunga pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat	
Selisih	

b. Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	
Selisih	

c. Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	
Selisih	

d. Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	
Selisih	

e. Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat	
Selisih	

f. Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD - Jangka Pendek

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Pendek			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Pendek	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Pendek	
Selisih	

g. Beban Bunga Utang Pinjaman

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang Pinjaman			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Bunga Utang Pinjaman	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang Pinjaman	
Selisih	

4. Beban Subsidi

Selisih beban subsidi LO dengan belanja subsidi pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Subsidi kepada BUMN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Subsidi kepada BUMN			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Subsidi kepada BUMN	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Subsidi kepada BUMN	
Selisih	

b. Beban Subsidi kepada BUMD

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Subsidi kepada BUMD			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Subsidi kepada BUMD	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Subsidi kepada BUMD	
Selisih	

c. Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	
Selisih	

d. Beban Subsidi kepada Koperasi

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Subsidi kepada Koperasi			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Subsidi kepada Koperasi	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Subsidi kepada Koperasi	
Selisih	

5. Beban Hibah

Selisih Beban Hibah LO dengan Belanja Hibah pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklas dari Belanja Modal	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Hutang Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	
Penambahan Hibah Keluar barang persediaan ke Pem. Pusat	
Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap ke Pem. Pusat	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke B. Persediaan	
Pengurangan Reklas ke B. Pegawai	
Pengurangan Reklas ke B. Jasa	
Pengurangan Reklas ke B. Pemeliharaan	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	
Selisih	

b. Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklas dari Belanja Modal	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Hutang Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
Penambahan Hibah Keluar barang persediaan ke Pem. Daerah Lainnya	
Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap ke Pem. Daerah Lainnya	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke B. Persediaan	
Pengurangan Reklas ke B. Pegawai	
Pengurangan Reklas ke B. Jasa	
Pengurangan Reklas ke B. Pemeliharaan	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
Selisih	

c. Beban Hibah kepada BUMN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah kepada BUMN			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklas dari Belanja Modal	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Hutang Beban Hibah kepada BUMN	
Penambahan Hibah Keluar barang persediaan ke BUMN	
Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap ke BUMN	

Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke B. Persediaan	
Pengurangan Reklas ke B. Pegawai	
Pengurangan Reklas ke B. Jasa	
Pengurangan Reklas ke B. Pemeliharaan	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah kepada BUMN	
Selisih	

d. Beban Hibah Uang kepada BUMD

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah Uang kepada BUMD			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Hibah Uang kepada BUMD	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Hibah Keluar barang persediaan ke BUMD	
Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap ke BUMD	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah Uang kepada BUMD	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Selisih	

e. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	

Uraian	(Rp)
Penambahan Hutang Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Hibah Keluar barang persediaan ke Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	
Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap ke Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Pengurangan Reklas ke Beban Bantuan Sosial	
Selisih	

f. Beban Hibah Dana BOS

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah Dana BOS			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Selisih	

g. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Selisih	

6. Beban Bantuan Sosial (khusus SKPD pengelola Bansos)

Selisih Beban Bantuan Sosial LO dengan Belanja BANTUAN Sosial pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklas dari Belanja Modal	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Hutang Beban Bansos Uang Kepada Individu	
Penambahan Hibah Keluar barang persediaan kepada individu	
Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap kepada individu	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke B. Persediaan	
Pengurangan Reklas ke B. Pegawai	
Pengurangan Reklas ke B. Jasa	
Pengurangan Reklas ke B.Pemeliharaan	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah kepada individu	
Selisih	

b. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklas dari Belanja Modal	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Hutang Beban Bansos Kepada Keluarga	

Penambahan Hibah Keluar barang persediaan kepada keluarga	
Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap kepada keluarga	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke B. Persediaan	
Pengurangan Reklas ke B. Pegawai	
Pengurangan Reklas ke B. Jasa	
Pengurangan Reklas ke B.Pemeliharaan	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah kepada keluarga	
Selisih	

c. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
eban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklas dari Belanja Modal	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Hutang Beban Hibah kepada kelompok Masyarakat	
Penambahan Hibah Keluar barang persediaan kepada kelompok masyarakat	
Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap kepada kelompok masyarakat	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke B. Persediaan	
Pengurangan Reklas ke B. Pegawai	
Pengurangan Reklas ke B. Jasa	
Pengurangan Reklas ke B.Pemeliharaan	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah kepada kelompok masyarakat	
Selisih	

d. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Hibah Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Hibah Keluar barang persediaan ke Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	
Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap ke Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Selisih	

7. Beban Penyisihan Piutang

Selisih Beban Penyisihan Piutang LO dengan LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah atas penerimaan piutang	
Selisih	

b. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyisihan Retribusi Daerah	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Beban Penyisihan Retribusi Daerah atas penerimaan piutang	
Selisih	

c. Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan - Piutang Bag. Laba yang biagikan kpd Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pd BUMD	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan atas penerimaan Piutang Bag. Laba yang biagikan kpd Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pd BUMD	
Selisih	

d. Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan BLUD	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Hasil Eksekusi Atas Jaminan	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Pokok)	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Jasa)	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - TP-TGR	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Denda Pajak Daerah	

Uraian	(Rp)
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Denda Retribusi Daerah	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang BLUD	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Hasil Eksekusi Atas Jaminan	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Pokok)	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Jasa)	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang TPTGR	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	
Selisih	

e. Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Desa	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat atas penerimaan piutang Dana Perimbangan	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat atas penerimaan piutang Dana Insentif Daerah	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat atas penerimaan piutang Dana Desa	
Selisih	

f. Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
---------------	------------------	-------------------	----------------

Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah			
--	--	--	--

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah - Bagi Hasil Pajak Prov	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah atas penerimaan piutang Bagi Hasil Pajak Prov	
Selisih	

g. Beban Penyisihan Piutang Lainnya

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Lainnya			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian Lancar TGR	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lainnya atas penerimaan piutang Bagian Lancar TGR	
Selisih	

3.7.1.2.2. Beban Penyusutan Dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi hanya diakui pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran.

1. Beban Penyusutan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin			
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan			
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi			
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			
Beban Penyusutan Aset Lainnya			
Jumlah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
--------	------

Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyusutan	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (tambah)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (kurang)	
Selisih	

2. Beban Amortisasi

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Amortisasi	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (tambah)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (kurang)	
Selisih	

3.7.1.2.3. Beban Transfer

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bagi Hasil			
Beban Bantuan Keuangan			
Jumlah			

1. Beban Bagi Hasil

Selisih Beban Bagi Hasil LO dan Belanja Bagi Hasil LRA adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa			
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa			
Jumlah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	

Penambahan Utang Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban (tambah)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban (kurang)	
Selisih	

2. Beban Bantuan Keuangan

Selisih Beban Bantuan Keuangan LO dan Belanja Bantuan Keuangan LRA adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi			
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota			
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota			
Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi			
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa			
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota			
Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik			
Jumlah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Bantuan Keuangan ke Desa	
Penambahan Utang Beban Bantuan Keuangan ke Partai Politik	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban (tambah)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bantuan Keuangan ke Desa	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bantuan Keuangan ke Partai Politik	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban (kurang)	
Selisih	

3.7.1.2.4. Beban Tidak Terduga

Selisih Beban Tidak Terduga LO dan Belanja Tidak Terduga LRA sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Tidak Terduga			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Tidak Terduga	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Tidak Terduga	
Pengurangan Reklasifikasi ke Beban Persediaan	
Selisih	

3.7.1.2.5. Defisit Non Operasional

1. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Selisih Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO dengan LRA sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO			
Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO			
Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO			
Jumlah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Defisit Penjualan BMD	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Selisih	

2. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

Selisih Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO dengan LRA sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO			
Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO			
Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO			
Defisit Penyelesaian Obligasi-LO			
Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO			

Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO			
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO			
Jumlah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Defisit Utang	
Penambahan Defisit Obligasi	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Selisih	

BAB IV**PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN****4.1 UMUM**

Kabupaten Brebes memiliki eksistensi untuk membangun kompetensi daerah yang berbeda saing dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki meliputi sumber daya manusi, ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes memiliki Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang Kesehatan.

4.2 ORGANISASI

Struktur Organisasi SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi SKPD Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, membawahi :

1. Kepala ;
2. Sekretaris :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat :
 - a. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Sub Koordinator Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit:
 - a. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
5. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - a. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Peningkatan Mutu;
 - b. Sub Koordinator Pembiayaan dan Perijinan Pelayanan Kesehatan.
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan
 - a. Sub Koordinator Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan;
 - b. Sub Koordinator Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis.

4.3 PERSONALIA

Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes memiliki 105 personil, terdiri dari 1 orang Kepala Dinas , 3 orang Kepala Bidang, 9 orang Kasubag/Kasi, 93 orang staf di mana 51 orang adalah PNS dan 42 orang adalah tenaga kontrak/tenaga harian lepas.

BAB V
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2023. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BREBES



(INEKE TRISULISTYOWATY, SKM, M.Kes)